



## REFERENDUM THAILAND DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-THAILAND

Lisbet\*)

### Abstrak

*Thailand baru saja melaksanakan referendum yang hasilnya menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Thailand menyetujui konstitusi baru yang dirancang oleh militer. Di bawah konstitusi tersebut, militer akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah jalannya pemerintahan di Thailand. Besarnya peran militer di bawah konstitusi baru dan perubahan-perubahan yang mungkin ditimbulkan, tampaknya tidak akan memberi dampak negatif terhadap kelangsungan berbagai kerja sama bilateral Indonesia-Thailand. Kendati demikian, DPR hendaknya mengingatkan pemerintah dan juga turut berperan langsung dalam mendorong Pemerintah Thailand untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.*

### Pendahuluan

Pada tanggal 7 Agustus 2016, rakyat Thailand telah berpartisipasi dalam menentukan masa depan Thailand melalui referendum. Referendum dilaksanakan untuk mengetahui seberapa banyak rakyat yang setuju terhadap rancangan konstitusi baru yang dirancang oleh militer Thailand. Hasil dari referendum ini adalah sebagian besar rakyat Thailand menyatakan dukungannya terhadap rancangan konstitusi baru tersebut. Dari 94 persen jumlah suara yang dihitung, sebanyak 61,35 persen suara yang mendukung dan yang 38,65 persen yang menentang Rancangan Konstitusi baru tersebut.

Dengan besarnya dukungan yang diberikan oleh rakyat terhadap rancangan konstitusi baru ini dan melihat pada substansinya, tampaknya konstitusi ini akan semakin memperkuat kehadiran militer dalam bidang politik Thailand. Bagaimana pengaruh konstitusi tersebut terhadap hubungan bilateral Indonesia-Thailand di masa depan?

### Konstitusi Baru dan Peran Militer

Beberapa substansi rancangan konstitusi Thailand yang baru ini telah menjadi perdebatan di dalam negeri dan menarik perhatian masyarakat internasional.

\*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: lisbet.sihombing@dpr.go.id



*Pertama*, pemerintah Thailand yang terpilih melalui pemilihan umum (Pemilu) pada Desember 2017, secara hukum, wajib mengikuti Rencana Pembangunan Nasional selama 20 tahun yang telah ditetapkan oleh militer. *Kedua*, Pemerintah junta militer Thailand akan menunjuk Anggota Senat kemudian Anggota Senat terpilih tersebut nantinya akan menyediakan kursi bagi para komandan militernya untuk bertugas mengawasi kinerja para anggota parlemen yang terpilih secara demokratis dalam Pemilu Desember 2017. Dengan demikian, semua reformasi yang dikehendaki oleh militer Thailand akan benar-benar dilakukan. Para komandan militer dapat menjamin bahwa setiap perubahan akan dilaksanakan dan pada saat yang sama juga meyakinkan bahwa pemerintah terpilih akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang dibebankan pada mereka. *Ketiga*, salah satu isi dari rancangan konstitusi yang baru itu juga akan memungkinkan bagi perdana menteri yang tidak terpilih melalui Pemilu mengambil kekuasaan ketika krisis politik terjadi. Isi lain dari rancangan konstitusi itu adalah memastikan untuk tidak akan terjadi lagi kudeta militer. Militer di Thailand, secara historis akan beroperasi secara independen dan terlepas dari pemerintahan sipil.

Meskipun hasil referendum menunjukkan bahwa rancangan konstitusi ini memperoleh dukungan yang sangat besar, namun proses menuju referendum bukanlah langkah yang mudah. Pada saat menjelang referendum sudah banyak politikus dan mahasiswa yang ditahan oleh Pemerintah karena melakukan kampanye untuk menolak rancangan konstitusi baru yang dirancang oleh militer Thailand. Para politikus dan mahasiswa tersebut ditahan karena dinilai melancarkan kritikan yang bersifat provokatif terhadap pemerintah. Kampanye ini juga dianggap Pemerintah sebagai kegiatan untuk mengajak rakyat menolak rancangan konstitusi baru ini.

Besarnya dukungan yang diberikan rakyat terhadap rancangan konstitusi baru ini akan semakin memperkuat kehadiran militer dalam bidang politik. Tidak hanya itu saja, apabila para komandan militer nantinya duduk sebagai Anggota Senat seperti yang ditetapkan dalam rancangan konstitusi baru, maka para komandan militer ini akan memiliki kekuasaan untuk

menetapkan konstitusi baru yang akan semakin membatasi ruang gerak rakyat yang hendak mengeluarkan pendapatnya. Bahkan, rakyat yang berani mengkritik kebijakan pemerintahan militer akan ditahan. Tidak hanya di bidang politik, Pemerintahan Militer Thailand juga nantinya akan mengawasi jalannya pembangunan ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Nasional selama 20 tahun. Padahal selama ini, belum terdapat pemerintahan Thailand yang mengadopsi strategi nasional selama 20 tahun, terlebih lagi dalam menerapkannya.

### Dampak Referendum terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand sudah terjalin sejak 7 Maret 1950. Hubungan bilateral ini lebih banyak dilakukan dalam bidang ekonomi. Adapun produk ekspor utama Indonesia ke Thailand antara lain produk mineral, minyak mentah, bijih besi, batu bara, mesin dan peralatan, produk kimia, suku cadang dan aksesoris kendaraan, mesin dan peralatan listrik, produk makanan laut, *pulp and paper*, dan produk kertas. Sedangkan impor Indonesia dari Thailand antara lain otomobil, suku cadang dan aksesoris, mesin dan peralatan, produk kimia, *polymers and propylene*, besi dan baja, produk tapioka, mesin dan suku cadang pengatur suhu, sepeda motor dan suku cadang serta aksesoris, produk metal dan baja, beras, gula, tekstil dan pakaian, serta produk makanan.

Hubungan bilateral ini semakin diperkuat dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan Ekspor antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI dan *Department of International Trade Promotion Ministry of Commerce Thailand* pada tanggal 25 September 2013 di Bangkok, Thailand. Kerja sama ini ditujukan untuk semakin meningkatkan kerja sama kedua negara dalam pengembangan ekspor guna memaksimalkan manfaat dari *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*.

Selain membina hubungan bilateral secara *government to government*, Indonesia dan Thailand juga telah membina hubungan *parliament to parliament*. Pada tanggal

15 September 2015, Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI telah meresmikan pembentukan 49 Grup Kerja Sama Bilateral, dan Parlemen Thailand termasuk di dalamnya. Dengan adanya GKSB DPR RI-Parlemen Thailand ini, diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam kerangka pelaksanaan peran Diplomasi Parlemen. Sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral Indonesia-Thailand, Delegasi GKSB DPR RI telah melakukan kunjungannya ke Parlemen Thailand pada tanggal 7-13 Februari 2016. Pada kunjungan ini, Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Thailand membahas tentang *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*; Terorisme dan Radikalisme; Perdagangan dan Investasi; serta persiapan kedua negara dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pemerintahan Thailand sudah beberapa kali diambil alih melalui kudeta militer. Pada saat kudeta militer tersebut, memang banyak terjadi tindak kekerasan terhadap rakyat Thailand yang tidak mendukung Pemerintah sehingga stabilitas politik Thailand menjadi terganggu dan rakyat pun merasa tidak aman. Akan tetapi, dengan besarnya dukungan rakyat Thailand terhadap rancangan konstitusi yang baru secara tidak langsung menunjukkan dukungan rakyat terhadap keterlibatan Militer dalam sistem politik Thailand. Rakyat Thailand menghendaki adanya kestabilan politik dan terciptanya rasa aman. Oleh karena itu, meskipun Pemerintah Thailand nantinya akan dipimpin oleh militer, namun tidak akan berdampak negatif terhadap kerja sama bilateral Indonesia dan Thailand. Prediksi ini mengacu pada kudeta militer yang terjadi pada Mei 2014 lalu di mana hubungan kerja sama ekonomi tetap terjalin baik antara kedua negara.

Pada tanggal 21-25 Mei 2014, Kementerian Perdagangan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) yang bekerja sama dengan Atase Perdagangan di Bangkok berhasil mempromosikan produk makanan dan minuman hasil olahan Indonesia dalam Pameran *THAIFEX-World of Food Asia 2014*. Dari pameran tersebut, Indonesia memperoleh *prospective orders* sebesar US\$848.700. Di samping itu, masih pada kesempatan yang sama, Indonesia melalui PT Indofood Fritolay Makmur juga

telah mendapatkan penghargaan sebagai distributor terbaik se-Asia Tenggara dan Barista Indonesia Roga Rayoga juga berhasil meraih tiga dari empat penghargaan *Roaster's Choice Award 2014* untuk kategori *latte, brewer, dan steampunk*. Tingginya nilai permintaan dan penghargaan yang diterima Indonesia menjadi bukti bahwa kerja sama ekonomi Indonesia dan Thailand masih terus berjalan dengan baik walaupun saat itu sedang terjadi kudeta militer di Thailand.

Selain itu, Indonesia juga memiliki daya tawar yang tinggi bagi Thailand. Thailand memerlukan dukungan Indonesia untuk memasukkan produk-produk Thailand yang bersertifikasi halal ke pasar Indonesia. Tidak hanya itu saja, Thailand juga memerlukan pasar Indonesia yang besar untuk memasarkan produk-produknya. Selain itu, Indonesia pun memiliki kepentingan nasionalnya seperti, Indonesia mengharapkan jumlah kasus *IUU Fishing* di wilayah Indonesia oleh nelayan Thailand akan semakin berkurang. Indonesia juga hendak mengembangkan kerja sama di bidang pengembangan pariwisata dengan belajar dari Thailand yang merupakan salah satu tujuan utama wisata internasional. Di samping itu, Indonesia juga mengharapkan kerja sama ekonomi Indonesia dan Thailand yang telah terjalin lama dan tidak memiliki dampak negatif meskipun terjadi kudeta militer di Thailand. Indonesia berharap agar akan lebih banyak lagi investor dari Thailand akan datang ke Indonesia untuk berinvestasi karena Indonesia merupakan pasar yang besar.

Di bidang politik, sebagai negara penganut demokrasi, Indonesia perlu mendorong Pemerintah Thailand untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam melaksanakan Pemilihan Umum pada tahun 2017 mendatang. Dengan demikian dukungan masyarakat terhadap referendum ini pun akan membawa manfaat bagi rakyat Thailand. Dorongan Indonesia ini diperlukan karena sesuai dengan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan sebagai wujud kepedulian Indonesia agar nilai-nilai yang terdapat di Piagam ASEAN juga dapat diterapkan oleh anggota ASEAN lainnya. Selain itu, Indonesia dan negara ASEAN lainnya juga berkeinginan agar stabilitas politik di Thailand tetap terjaga karena saat ini, seluruh anggota ASEAN

sudah tergabung dalam Komunitas ASEAN. Komunitas ASEAN merupakan komunitas yang saling peduli satu dengan lainnya dan senantiasa memberikan saran satu sama lain (*sharing and caring community*).

## Penutup

Hasil referendum Thailand yang berlangsung tanggal 7 Agustus 2016 menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Thailand mendukung rancangan konstitusi yang baru. Dengan kata lain, rakyat juga mendukung bahwa pada tahun 2017 mendatang, militer Thailand akan berkuasa di Thailand. Perubahan kondisi politik dalam negeri Thailand tersebut tampaknya tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia-Thailand. Hubungan yang saling membutuhkan antara kedua negara memungkinkan stabilitas kerja sama bilateral tetap terjaga meskipun terjadi perubahan ataupun ketidakstabilan politik dalam negeri Thailand.

Meskipun demikian, perlu kiranya DPR mengingatkan Pemerintah agar terus mendorong Pemerintah Thailand untuk menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang telah menjadi komitmen bersama yang tertuang dalam Piagam ASEAN. Di samping itu, DPR hendaknya dapat memanfaatkan forum antar-parlemen Asia Tenggara (*AIPA/ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*) maupun dalam fora antar-parlemen lainnya untuk mendorong terciptanya nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Thailand.

## Referensi

- Bahan Laporan Kinerja Badan Kerja sama Antar Parlemen Tahun Sidang 2015-2016, BKSAP DPR RI.
- Amy Sawitta Lefevre dan Panarat Thepgumpanat, "Draft Charter won Approval From 61.35% of Voters", *The Jakarta Post*, 11 Agustus 2016, halaman 10.
- "Draf Konstitusi Thailand Dikritik", *Kompas*, 6 Agustus 2016, hlm 6.
- "Kemenangan Para Jenderal Thailand", *Media Indonesia*, 9 Agustus 2016, hlm 8.
- 'Mantan PM Yingluck Seru Pendukungnya Mencoblos', *Media Indonesia*, 8 Agustus 2016, hlm 10.
- "Rakyat Thailand Dukung Konstitusi Junta", *Koran Tempo*, 8 Agustus 2016, hlm 2.
- "Rakyat Thailand Dukung Konstitusi Militer", *Media Indonesia*, 8 Agustus 2016, hlm 10.
- Amanda Puspita Sari, "Konstitusi Rancangan Militer dalam Referendum Thailand", diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160806151340-106-149648/konstitusi-rancangan-militer-dalam-referendum-thailand/>, diakses 9 Agustus 2016.
- "Ditengah Kudeta, Produk Mamin RI Masih Laris di Thailand", diakses dari <http://www.kemendag.go.id/id/news/2014/06/05/di-tengah-kudeta-produk-mamin-ri-masih-laris-di-thailand>, diakses 15 Agustus 2016
- "Kerja Sama Indonesia-Thailand", diakses dari <http://kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=174>, diakses 11 Agustus 2016.
- "Prihatin Kondisi Thailand, Presiden SBY Ingatkan Kudeta Bukan Cara Demokratis", diakses dari <http://www.demokrat.or.id/2014/05/prihatin-kondisi-thailand-presiden-sby-ingatkan-kudeta-bukan-cara-demokratis/>, diakses 16 Agustus 2016.